



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara
4. Direktur Rumah Sakit Pemerintah se-Sulawesi Tenggara
5. Direktur Rumah Sakit TNI/Polri se-Sulawesi Tenggara
6. Direktur Rumah Sakit Swasta se-Sulawesi Tenggara
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.1/9 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA POLIO DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Surat Menteri Kesehatan mengenai pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio, Sulawesi Tenggara termasuk salah satu Provinsi yang memiliki risiko tinggi Polio maka sebagai langkah tindak lanjut dan pengaturan pelaksanaannya, perlu dikeluarkan Surat Edaran ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai langkah tindak lanjut penanggulangan KLB di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga diharapkan dapat mengantisipasi dan memitigasi dampak.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai pedoman dilaksanakannya pemberian imunisasi secara masif melalui PIN untuk memutus transmisi virus Polio.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat Dasar Hukum serta Isi Surat Edaran dengan esensi upaya penanggulangan KLB Polio melalui pelaksanaan PIN, yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota se- Sulawesi Tenggara.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Surat Menteri Kesehatan Nomor IM.02.03/Menkes/311/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1/2819/SJ tanggal 21 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio.

E. Isi Surat Edaran

Pelaksanaan PIN dalam rangka Penanggulangan KLB Polio di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota se-Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

1. Dukung dan optimalkan pelaksanaan PIN dengan sasaran anak usia 0-7 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya yang dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran dimulai tanggal 23 Juli 2024. Masing-masing putaran dilakukan dalam waktu 1 (satu) minggu ditambah 5 (lima) hari *sweeping*;
2. Vaksin yang digunakan adalah *novel Oral Polio Vaccine type 2 (nOPV2)* dengan jarak minimal antar pemberian vaksin adalah 2 (dua) minggu;
3. Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran dengan estimasi jumlah sasaran dan jumlah alokasi vaksin per Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir;
4. Pastikan ketersediaan sumber daya meliputi pembiayaan, tenaga, vaksin dan logistik lainnya yang dibutuhkan. Terhadap ketersediaan vaksin dan logistik agar Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota berkoordinasi secara berjenjang dengan Kementerian Kesehatan;
5. Susun *microplanning*, advokasi, sosialisasi, edukasi dan koordinasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh pihak terkait dan masyarakat;
6. Lakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan;
7. Usulkan status KLB Polio bagi Kabupaten/ Kota yang terdapat kasus Polio sebagai keadaan kahar/*force majeure*;
8. Siapkan langkah antisipasi, strategi untuk cegah dini dan kewaspadaan agar tidak terjadi transmisi kasus Polio di masing-masing Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;
9. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan PIN pada Provinsi/ Kabupaten/ Kota se-Sulawesi Tenggara.

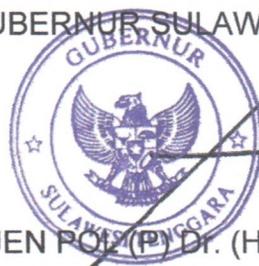
F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dipahami dan dijadikan pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, selanjutnya agar melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara guna diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Instansi terkait. Sekian dan terima kasih.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



KOMJEN POL (P) DI. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kesehatan;
3. Wakil Menteri Dalam Negeri;
4. Wakil Menteri Kesehatan;
5. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
8. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 100.3.4.1/9

TANGGAL : 25 JUNI 2024

**ESTIMASI JUMLAH SASARAN USIA 0 SAMPAI 7 TAHUN SERTA JUMLAH ALOKASI
VAKSIN nOPV2 PER KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sasaran 0-7 Tahun	Jumlah Dosis nOPV2 (2 Putaran)
1	Kolaka	35.565	89.000
2	Konawe	40.063	100.200
3	Muna	33.676	84.200
4	Buton	19.901	49.800
5	Konawe Selatan	48.478	121.200
6	Bombana	25.030	62.600
7	Wakatobi	17.839	44.600
8	Kolaka Utara	21.687	54.300
9	Konawe Utara	12.336	30.900
10	Buton Utara	11.108	27.800
11	Kolaka Timur	17.481	43.800
12	Konawe Kepulauan	6.211	15.600
13	Muna Barat	14.219	35.600
14	Buton Tengah	19.415	48.600
15	Buton Selatan	17.058	42.700
16	Kota Kendari	53.809	134.600
17	Kota Bau Bau	25.886	64.800
SULAWESI TENGGARA		419.762	1.050.300

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Juni 2024

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.5.1/2819/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO

Mempertimbangkan adanya situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) *Poliomyelitis* atau Penyakit Polio pada 7 (tujuh) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan, serta terdapat 32 Provinsi dengan 399 Kabupaten/Kota yang memiliki risiko tinggi Polio, perlu dilakukan pemberian imunisasi secara masif melalui kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk:

1. Mendukung dan mengoptimalkan capaian pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran seluruh anak usia 0-7 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya, yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. PIN Tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 (enam) Provinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya; dan
 - b. PIN Tahap 2 dimulai tanggal 23 Juli 2024 di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kep. Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, DI Yogyakarta (kecuali Kabupaten Sleman), Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara.
2. Menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/*force majeure*.
3. Penganggaran untuk penanggulangan Polio di daerah dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana Otonomi Khusus, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
5. Terhadap daerah yang tidak berstatus KLB, langkah pencegahan dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD, dan untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan seluruh yang pihak terkait.
7. Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik lainnya yang dibutuhkan, secara efektif dan efisien.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio pada kabupaten/kota di wilayahnya, dan melaporkan hasil pelaksanaannya setiap minggu kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Staf Kepresidenan;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pkt. Kepala Biro Hukum,


Wahyu Chandra Purwonegoro
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : IM.02.03/Menkes/ 311 /2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
Dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio

16 Mei 2024

Yth. (daftar terlampir)

Berdasarkan penilaian risiko menggunakan *tool* standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), Indonesia dikategorikan wilayah risiko tinggi penularan polio. Sejumlah 32 (84%) provinsi dan 399 (78%) kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi polio.

Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2 sejak akhir 2022 hingga saat ini dilaporkan terjadi di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Status KLB ini belum dicabut, karena kasus masih saja terus dilaporkan. Selain kasus polio tipe 2, kasus polio tipe 1 juga dilaporkan di Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya respon imunisasi yang masif dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio, baik tipe 2 maupun tipe 1.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memutus transmisi virus polio dan meningkatkan imunitas terhadap polio maka akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio atau PIN Polio. PIN akan dilaksanakan dalam 2 tahap.
 - a. PIN tahap 1 dilaksanakan di 6 provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
 - b. PIN tahap 2 dilaksanakan di 27 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, DIY (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

2. Sasaran PIN adalah seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
3. Vaksin yang digunakan adalah *novel Oral Polio Vaccine type 2* (nOPV2). Khusus 6 provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, selain vaksin nOPV2 juga digunakan *bivalent Oral Polio Vaccine* (bOPV).
4. PIN tahap 1 dimulai pada 27 Mei 2024, sementara PIN tahap 2 dimulai pada 15 Juli 2024.
5. Setiap tahapan PIN dilaksanakan dalam 2 putaran. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu 1 minggu ditambah 5 hari *sweeping*. Khusus PIN tahap 1 dimana bOPV juga diberikan, pemberian bOPV dimulai minimal 4 minggu setelah PIN nOPV2 putaran kedua selesai.
6. Jarak minimal antar putaran PIN adalah :
 - a. PIN nOPV2 : 2 minggu
 - b. PIN bOPV : 4 minggu (satu bulan).
7. Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran.
8. Estimasi jumlah sasaran dan jumlah alokasi vaksin per kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran surat ini.
9. Segera lakukan langkah persiapan dengan sebaik-baiknya, sebagai berikut:
 - Menyusun mikroplaning
 - Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah serta sosialisasi dan koordinasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh pihak terkait dan masyarakat pada umumnya.
 - Memastikan ketersediaan sumber daya baik pembiayaan, tenaga, serta vaksin dan logistik lainnya yang dibutuhkan. Ketersediaan vaksin dan logistik dapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Mohon agar Saudara beserta jajaran dapat menindaklanjutinya dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Kesehatan,



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Seluruh Bupati/Walikota di 33 Provinsi

Lampiran I

Nomor : IM.02.03/Menkes/ 311 /2024

Tanggal : 16 Mei 2024

Daftar Tujuan Surat

1. Gubernur Provinsi Papua
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah
3. Gubernur Provinsi Papua Selatan
4. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
5. Gubernur Provinsi Papua Barat
6. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya
7. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
8. Gubernur Provinsi Riau
9. Gubernur Provinsi Jambi
10. Gubernur Provinsi Bengkulu
11. Gubernur Provinsi Bangka Belitung
12. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
13. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
14. Gubernur Provinsi Lampung
15. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
16. Gubernur Provinsi Banten
17. Gubernur Provinsi DIY
18. Gubernur Provinsi Bali
19. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
21. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
22. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
23. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
24. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
25. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
26. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
27. Gubernur Provinsi Gorontalo
28. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
29. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

30. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
32. Gubernur Provinsi Maluku
33. Gubernur Provinsi Maluku Utara

Menteri Kesehatan,



Budi G. Sadikin

BUDI G. SADIKIN

Lampiran III

Nomor : IM.02.03/Menkes/ 311 /2024

Tanggal : 16 Mei 2024

PIN Tahap 1:

Estimasi Jumlah Sasaran Usia 0 Sampai 7 Tahun serta Jumlah Alokasi Vaksin nOPV2 dan bOPV Per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran 0-7 Tahun	Jumlah dosis nOPV2 (2 putaran)	Jumlah vial bOPV (2 putaran)
Jayapura	34,800	87,000	8,265
Kepulauan Yapen	21,574	54,000	5,124
Biak Numfor	24,932	62,400	5,922
Sarmi	8,164	20,500	1,939
Keerom	12,597	31,500	2,992
Waropen	7,510	18,800	1,784
Supiori	5,265	13,200	1,251
Mamberamo Raya	7,654	19,200	1,818
Kota Jayapura	66,163	165,500	15,714
Papua	188,659	472,100	44,809
Manokwari	30,025	75,100	7,131
Fak Fak	14,275	35,700	3,391
Teluk Bintuni	11,966	30,000	2,842
Teluk Wondama	8,377	21,000	1,990
Kaimana	9,765	24,500	2,320
Manokwari Selatan	5,905	14,800	1,403
Pegunungan Arfak	5,405	13,600	1,284
Papua Barat	85,718	214,700	20,361
Merauke	44,956	112,400	10,678
Boven Digoel	16,060	40,200	3,815
Mappi	25,760	64,400	6,118
Asmat	33,146	82,900	7,873
Papua Selatan	119,922	299,900	28,484
Nabire	31,879	79,700	7,572
Puncak Jaya	20,641	51,700	4,903
Paniai	32,936	82,400	7,823
Mimika	55,570	139,000	13,198
Puncak	13,351	33,400	3,171
Dogiyai	18,811	47,100	4,468
Intan Jaya	16,448	41,200	3,907
Deiyai	15,485	38,800	3,678
Papua Tengah	205,121	513,300	48,720
Jayawijaya	37,567	94,000	8,923
Pegunungan Bintang	13,552	33,900	3,219
Yahukimo	38,620	96,600	9,173
Tolikara	26,046	65,200	6,186
Mamberamo Tengah	8,539	21,400	2,029
Yalimo	13,756	34,400	3,268
Lanny Jaya	25,474	63,700	6,051
Nduga	11,673	29,200	2,773
Papua Pegunungan	175,227	438,400	41,622
Sorong	17,022	42,600	4,043
Sorong Selatan	9,153	22,900	2,174
Raja Ampat	12,499	31,300	2,969
Tambrau	5,942	14,900	1,412
Maybrat	7,254	18,200	1,723
Kota Sorong	39,173	98,000	9,304
Papua Barat Daya	91,043	227,900	21,625

Lampiran IV

Nomor : IM.02.03/Menkes/ 311 /2024

Tanggal : 16 Mei 2024

PIN Tahap 2:

Estimasi Jumlah Sasaran Usia 0 Sampai 7 Tahun serta Jumlah Alokasi Vaksin nOPV2 Per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran 0-7 Tahun	Jumlah dosis nOPV2 (2 putaran)
Pesisir Selatan	72,842	182,200
Solok	53,732	134,400
Sijunjung	34,087	85,300
Tanah Datar	45,594	114,000
Padang Pariaman	60,981	152,500
Agam	69,702	174,300
Lima Puluh Kota	49,600	124,000
Pasaman	44,399	111,000
Kepulauan Mentawai	13,170	33,000
Dharmasraya	34,297	85,800
Solok Selatan	28,151	70,400
Pasaman Barat	66,877	167,200
Kota Padang	127,140	317,900
Kota Solok	11,684	29,300
Kota Sawahlunto	9,355	23,400
Kota Padang Panjang	8,792	22,000
Kota Bukittinggi	17,257	43,200
Kota Payakumbuh	20,094	50,300
Kota Pariaman	13,713	34,300
Sumatera Barat	781,467	1,954,500
Kampar	133,696	334,300
Indragiri Hulu	65,032	162,600
Bengkalis	90,292	225,800
Indragiri Hilir	90,974	227,500
Pelalawan	62,441	156,200
Rokan Hulu	78,550	196,400
Rokan Hilir	94,160	235,400
Siak	69,370	173,500
Kuantan Singingi	47,667	119,200
Kepulauan Meranti	29,273	73,200
Kota Pekanbaru	145,754	364,400
Kota Dumai	49,866	124,700
Riau	957,075	2,393,200
Kerinci	32,012	80,100
Merangin	50,838	127,100
Sarolangun	48,162	120,500
Batanghari	43,610	109,100
Muaro Jambi	57,218	143,100
Tanjung Jabung Barat	47,709	119,300
Tanjung Jabung Timur	32,707	81,800
Bungo	52,305	130,800
Tebo	51,799	129,500
Kota Jambi	80,297	200,800
Kota Sungai Penuh	12,634	31,600
Jambi	509,291	1,273,700

Ogan Komering Ulu	53,603	134,100
Ogan Komering Ilir	104,200	260,500
Muara Enim	92,243	230,700
Lahat	60,275	150,700
Musi Rawas	54,962	137,500
Musi Banyuasin	96,823	242,100
Banyuasin	117,304	293,300
Ogan Komering Ulu Timur	87,115	217,800
Ogan Komering Ulu Selatan	55,241	138,200
Ogan Ilir	60,548	151,400
Empat Lawang	40,099	100,300
Penukal Abab Lematang Ilir	31,566	79,000
Musi Rawas Utara	28,012	70,100
Kota Palembang	236,459	591,200
Kota Pagar Alam	19,907	49,800
Kota Lubuk linggau	35,745	89,400
Kota Prabumulih	29,472	73,700
Sumatera Selatan	1,203,574	3,009,800
Bengkulu Selatan	22,853	57,200
Rejang Lebong	36,382	91,000
Bengkulu Utara	43,126	107,900
Kaur	17,652	44,200
Seluma	29,353	73,400
Muko muko	29,643	74,200
Lebong	15,425	38,600
Kepahiang	19,904	49,800
Bengkulu Tengah	16,910	42,300
Kota Bengkulu	56,293	140,800
Bengkulu	287,541	719,400
Lampung Selatan	157,210	393,100
Lampung Tengah	193,773	484,500
Lampung Utara	90,982	227,500
Lampung Barat	45,193	113,000
Tulang bawang	61,370	153,500
Tanggamus	91,260	228,200
Lampung Timur	143,962	360,000
Way Kanan	71,390	178,500
Pesawaran	68,789	172,000
Pringsewu	56,039	140,100
Mesuji	34,106	85,300
Tulang bawang Barat	40,879	102,200
Pesisir Barat	26,438	66,100
Kota Bandar Lampung	155,109	387,800
Kota Metro	23,039	57,600
Lampung	1,259,539	3,149,400

Bangka	38,337	95,900
Belitung	23,616	59,100
Bangka Selatan	25,976	65,000
Bangka Tengah	28,438	71,100
Bangka Barat	28,204	70,600
Belitung Timur	15,965	40,000
Kota Pangkal Pinang	31,761	79,500
Bangka Belitung	192,297	481,200
Bintan	22,653	56,700
Karimun	36,571	91,500
Natuna	12,387	31,000
Lingga	13,138	32,900
Kepulauan Anambas	7,264	18,200
Kota Batam	184,804	462,100
Kota Tanjung Pinang	30,353	75,900
Kepulauan Riau	307,170	768,300
Kepulauan Seribu	4,295	10,800
Kota Jakarta Pusat	105,390	263,500
Kota Jakarta Utara	218,303	545,800
Kota Jakarta Barat	283,846	709,700
Kota Jakarta Selatan	238,516	596,300
Kota Jakarta Timur	358,953	897,400
DKI Jakarta	1,209,303	3,023,500
Kulon Progo	46,435	116,100
Bantul	108,068	270,200
Gunungkidul	72,915	182,300
Kota Yogyakarta	36,407	91,100
DIY	263,825	659,700
Pandeglang	175,990	440,000
Lebak	197,163	493,000
Tangerang	438,523	1,096,400
Serang	231,378	578,500
Kota Tangerang	245,257	613,200
Kota Cilegon	65,399	163,500
Kota Serang	102,217	255,600
Kota Tangerang Selatan	156,904	392,300
Banten	1,612,831	4,032,500
Jembrana	37,930	94,900
Tabanan	45,115	112,800
Badung	60,412	151,100
Gianyar	55,377	138,500
Klungkung	23,858	59,700
Bangli	28,770	72,000
Karang Asem	61,710	154,300
Buleleng	98,633	246,600
Kota Denpasar	81,153	202,900
Bali	492,958	1,232,800

Lombok Barat	111,835	279,600
Lombok Tengah	151,608	379,100
Lombok Timur	219,458	548,700
Sumbawa	71,563	179,000
Dompu	37,323	93,400
Bima	77,941	194,900
Sumbawa Barat	23,896	59,800
Lombok Utara	40,259	100,700
Kota Mataram	62,034	155,100
Kota Bima	24,570	61,500
NTB	820,487	2,051,800
Kupang	53,645	134,200
Timor Tengah Selatan	70,651	176,700
Timor Tengah Utara	44,138	110,400
Belu	38,010	95,100
Alor	38,471	96,200
Flores Timur	44,313	110,800
Sikka	53,990	135,000
Ende	35,602	89,100
Ngada	25,043	62,700
Manggarai	56,146	140,400
Sumba Timur	45,787	114,500
Sumba Barat	28,273	70,700
Lembata	24,100	60,300
Rote Ndao	26,947	67,400
Manggarai Barat	49,087	122,800
Nagekeo	24,309	60,800
Sumba Tengah	17,619	44,100
Sumba Barat Daya	64,043	160,200
Manggarai Timur	49,216	123,100
Sabu Raijua	17,559	43,900
Malaka	28,497	71,300
Kota Kupang	74,641	186,700
NTT	910,087	2,276,400
Sambas	90,293	225,800
Mempawah	43,283	108,300
Sanggau	67,779	169,500
Ketapang	78,648	196,700
Sintang	61,881	154,800
Kapuas Hulu	35,910	89,800
Bengkayang	41,991	105,000
Landak	59,212	148,100
Sekadau	30,130	75,400
Melawi	32,129	80,400
Kayong Utara	18,824	47,100
Kubu Raya	91,255	228,200
Kota Pontianak	88,366	221,000
Kota Singkawang	36,998	92,500
Kalimantan Barat	776,699	1,942,600
Kotawaringin Barat	39,453	98,700
Kotawaringin Timur	57,733	144,400
Kapuas	54,729	136,900
Barito Selatan	17,549	43,900
Barito Utara	21,595	54,000
Katingan	24,391	61,000
Seruyan	23,598	59,000
Sukamara	9,275	23,200
Lamandau	14,185	35,500
Gunung Mas	21,096	52,800
Pulang Pisau	18,533	46,400
Murung Raya	17,075	42,700
Barito Timur	14,721	36,900
Kota Palangkaraya	42,232	105,600
Kalimantan Tengah	376,165	941,000

Tanah Laut	49,852	124,700
Kota Baru	48,422	121,100
Banjar	82,281	205,800
Barito Kuala	44,436	111,100
Tapin	26,863	67,200
Hulu Sungai Selatan	31,521	78,900
Hulu Sungai Tengah	35,115	87,800
Hulu Sungai Utara	33,441	83,700
Tabalong	38,058	95,200
Tanah Bumbu	53,572	134,000
Balangan	20,008	50,100
Kota Banjarmasin	86,471	216,200
Kota Banjarbaru	38,991	97,500
Kalimantan Selatan	589,031	1,473,300
Paser	38,883	97,300
Kutai Kartanegara	102,730	256,900
Berau	35,740	89,400
Kutai Barat	22,165	55,500
Kutai Timur	58,688	146,800
Penajam Paser Utara	34,758	86,900
Mahakam Ulu	4,508	11,300
Kota Balikpapan	93,142	232,900
Kota Samarinda	104,489	261,300
Kota Bontang	26,820	67,100
Kalimantan Timur	521,923	1,305,400
Bulungan	20,909	52,300
Malinau	11,731	29,400
Nunukan	27,377	68,500
Tana Tidung	4,456	11,200
Kota Tarakan	34,615	86,600
Kalimantan Utara	99,088	248,000
Bolaang Mongondow	30,941	77,400
Minahasa	38,640	96,600
Kepulauan Sangihe	15,314	38,300
Kepulauan Talaud	11,346	28,400
Minahasa Selatan	27,212	68,100
Minahasa Utara	27,467	68,700
Minahasa Tenggara	15,572	39,000
Bolaang Mongondow Utara	11,640	29,100
Kep. Siau Tagulandang Biaro	7,894	19,800
Bolaang Mongondow Selatan	10,102	25,300
Bolaang Mongondow Timur	11,087	27,800
Kota Manado	55,272	138,200
Kota Bitung	29,221	73,100
Kota Tomohon	12,371	31,000
Kota Kotamobagu	16,183	40,500
Sulawesi Utara	320,262	801,300
Banggai	50,797	127,000
Poso	32,339	80,900
Donggala	40,849	102,200
Toli-Toli	35,229	88,100
Buol	24,261	60,700
Morowali	26,929	67,400
Banggai Kepulauan	17,078	42,700
Parigi Moutong	58,423	146,100
Tojo Una Una	24,957	62,400
Sigi	36,905	92,300
Banggai Laut	11,430	28,600
Morowali Utara	17,921	44,900
Kota Palu	57,469	143,700
Sulawesi Tengah	434,587	1,087,000

Selayar	16,878	42,200
Bulukumba	54,350	135,900
Bantaeng	25,839	64,600
Jeneponto	53,402	133,600
Takalar	43,864	109,700
Gowa	105,712	264,300
Sinjai	34,829	87,100
Bone	98,265	245,700
Maros	57,063	142,700
Pangkajene dan Kepulauan	47,064	117,700
Barru	23,556	58,900
Soppeng	26,257	65,700
Wajo	44,250	110,700
Sidenreng Rappang	41,697	104,300
Pinrang	55,650	139,200
Enrekang	31,717	79,300
Luwu	51,678	129,200
Tana Toraja	36,573	91,500
Luwu Utara	44,705	111,800
Luwu Timur	44,993	112,500
Toraja Utara	40,880	102,200
Kota Makassar	184,267	460,700
Kota ParePare	23,500	58,800
Kota Palopo	27,990	70,000
Sulawesi Selatan	1,214,979	3,038,300
Kolaka	35,565	89,000
Konawe	40,063	100,200
Muna	33,676	84,200
Buton	19,901	49,800
Konawe Selatan	48,478	121,200
Bombana	25,030	62,600
Wakatobi	17,839	44,600
Kolaka Utara	21,687	54,300
Konawe Utara	12,336	30,900
Buton Utara	11,108	27,800
Kolaka Timur	17,481	43,800
Konawe Kepulauan	6,211	15,600
Muna Barat	14,219	35,600
Buton Tengah	19,415	48,600
Buton Selatan	17,058	42,700
Kota Kendari	53,809	134,600
Kota Bau Bau	25,886	64,800
Sulawesi Tenggara	419,762	1,050,300
Gorontalo	53,409	133,600
Boalemo	20,828	52,100
Bone Bolango	22,742	56,900
Pohuwato	20,872	52,200
Gorontalo Utara	18,198	45,500
Kota Gorontalo	26,703	66,800
Gorontalo	162,752	407,100
Pasangkayu	30,586	76,500
Mamuju	46,464	116,200
Mamasa	24,585	61,500
Polewali Mandar	72,304	180,800
Majene	30,212	75,600
Mamuju Tengah	23,540	58,900
Sulawesi Barat	227,691	569,500

Maluku Tengah	55,338	138,400
Maluku Tenggara	17,024	42,600
Kepulauan Tanimbar	18,758	46,900
Buru	21,310	53,300
Seram Bagian Timur	22,627	56,600
Seram Bagian Barat	35,086	87,800
Kepulauan Aru	16,816	42,100
Maluku Barat Daya	13,862	34,700
Buru Selatan	13,565	34,000
Kota Ambon	47,309	118,300
Kota Tual	12,869	32,200
Maluku	274,564	686,900
Halmahera Barat	17,851	44,700
Halmahera Tengah	9,575	24,000
Halmahera Utara	30,181	75,500
Halmahera Selatan	37,641	94,200
Kepulauan Sula	15,785	39,500
Halmahera Timur	14,789	37,000
Pulau Morotai	13,939	34,900
Pulau Taliabu	9,614	24,100
Kota Ternate	30,380	76,000
Kota Tidore Kepulauan	15,757	39,400
Maluku Utara	195,512	489,300



Menteri Kesehatan,

Budi G. Sadikin
BUDI G. SADIKIN